



Demokrasi Langsung Munisipalisme Libertarian Sebagai Substansi Gerakan Agraria

Ahmad Sayyidulhaq Arrobbani Lubis¹, Faiz Albar Nasution^{1*}

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Munisipalisme libertarian mendekati masalah lingkungan dan masyarakat dari perspektif ekologi sosial, dengan berargumen bahwa masalah lingkungan yang ada merupakan hasil dari kurangnya partisipasi politik masyarakat lokal dalam kebijakan dan manajemen. Akibatnya, bagaimana paradigma demokrasi langsung dalam munisipalisme libertarian dapat menjadi landasan bagi perjuangan gerakan pertanian. Penelitian ini berusaha untuk memahami paradigma pemikiran munisipalisme libertarian dalam menjawab tantangan lingkungan dan masyarakat melalui demokrasi langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan pemahaman dan mempelajari teori dari berbagai sumber literatur. Menggunakan metode analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Studi ini menyoroti pentingnya memahami isu-isu pertanian karena kurangnya demokrasi lokal dengan melibatkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kebijakan. Munisipalisme libertarian bertujuan untuk menciptakan ruang publik untuk pemerintahan yang otonom, mengatasi parlementerisme dan mekanisme partai. Gerakan agraria dengan berprinsip demokrasi langsung munisipalisme libertarian harus melibatkan masyarakat luas, memberikan pendidikan publik, dan membuka diri terhadap partisipan. Gerakan ini harus mampu mengatasi kapitalisme, konsumsi yang berlebihan, dan manipulasi lingkungan yang terjadi. Hal ini menekankan pada demokrasi lokal, desentralisasi, dan kekuatan masyarakat lokal. Prinsip-prinsipnya meliputi pembangunan ekonomi, demokratisasi, proses pengambilan keputusan, komunitas sosial dan ekologi, dan partisipasi warga.

Kata Kunci: Demokrasi Langsung, Munisipalisme Libertarian, Gerakan Agraria.

Abstract

Libertarian municipalism approaches environmental and societal problems from a social-ecological perspective, arguing that environmental problems result from local people's lack of political participation in policy and management. Consequently, it shows how the paradigm of direct democracy in libertarian municipalism can be a foundation for the struggle of the agricultural movement. This research seeks to understand the paradigm of libertarian municipalism thinking in responding to environmental and community challenges through direct democracy. The method used in this research is a literature study. The data collection technique involves understanding and studying theories from various literature sources and using data analysis methods, including data reduction, data presentation, and decision-making. This study highlights the importance of understanding agricultural issues due to the lack of local democracy by involving community political participation in determining policies. Libertarian municipalism aims to create a public space for autonomous governance, overcoming parliamentarian and party mechanisms. An agrarian movement based on the direct democracy principles of libertarian municipalism must involve the wider community, provide public education, and be open to participants. The movement must be able to overcome capitalism, overconsumption and environmental manipulation. It emphasizes local democracy, decentralization, and the power of local communities. Its principles include economic development, democratization, decision-making processes, social and ecological communities, and citizen participation.

Keywords: Direct Democracy, Libertarian Municipalism, Agrarian Movement.

How to Cite: Lubis, A. S. A., & Nasution, F. A. (2024). Demokrasi Langsung Munisipalisme Libertarian Sebagai Substansi Gerakan Agraria, *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 3 (1), 9-16

*Corresponding author: Faiz Albar Nasution

E-mail: faiz@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Sistem kenegaraan telah menjadikan masyarakat, lahan, dan lingkungan sebagai objektifikasi dalam mengelola urusan publik mereka sendiri, agararinya negara seperti Indonesia tidak dapat dipungkiri secara peta geografisnya sangat memiliki hubungan timbal balik kuat antara warga dan lingkungan hidupnya. Relasi organisme dan lingkungan saling menentukan yang terkait dengan perubahan material dan material tersebut menjadi relasi itu sendiri (Foster, 2013). Namun seolah masyarakat terlampaui muda untuk mengelola urusan publik sebagai nasib hidup untuk diri mereka sendiri, sehingga masyarakat dibentuk sebagai kelompok pasif yang menjadikan otoritas negara sebagai satu-satunya juru selamat atas nasib hidup mereka. Hal ini sulit dipungkiri dimana peranan dan keterlibatan masyarakat hanya sebagai penonton, konstituen, pemilih politik elektoral, dan warga dengan kewajiban pajak. Hanya menjadikan masyarakat sebagai kelompok pasif dan tidak memiliki daya politik dalam relasinya dengan kebijakan publik, sehingga sentralisasi kebijakan yang ada cenderung tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan masyarakat lokal karena dominasi pembangunan yang berprinsip ekonomi neoliberal dan perdagangan bebas.

Simon Sumanjoyo Hutagalung berpendapat bahwa stabilitas pemerintah hanya dapat dipertahankan jika ada partisipasi masyarakat yang tumbuh dan adil dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi ini hanya dapat terjadi dalam suatu lingkungan yang memberikan kesempatan yang luas bagi individu untuk mengambil inisiatif, berkreasi, dan terlibat dalam pekerjaan yang produktif di semua tingkat masyarakat. Lebih lanjut Hutagalung mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela dan didorong oleh keinginan sendiri dalam proses pemerintahan (Hutagalung, 2022). Sejalan dengan kausalitasnya, jika bentuk otoritas masyarakat pasif dalam menentukan urusan mereka sendiri maka dalam persoalan kedepan, kebijakan yang diberikan oleh mandataris negara cenderung tidak berpihak dengan masyarakat.

Partisipasi dan kontrol masyarakat menjadi substansi agar dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak terhadap lingkungan dan dirinya diputuskan oleh diri masyarakat sendiri. Tantangannya tergolong besar karena pasar, industri dan regulasi negara diciptakan untuk membentuk masyarakat menjadi konsumtif dan membatasi masyarakat untuk melakukan kritik dan kontrol dalam lingkungan hidup. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai demokrasi langsung Munisiplaisme Libertarian dimana partisipasi dan kontrol tersebut hadir di dalam sekup terkecil masyarakat. Masalah mendasarnya adalah mengubah struktur masyarakat sehingga masyarakat dapat meraih kekuasaan. Munisipalisme adalah arena yang ideal untuk melakukannya; di antara kota-kota besar, kota-kota kecil, dan desa-desa, kita memiliki kesempatan untuk membangun demokrasi tatap muka. Kita dapat mengubah pemerintah lokal menjadi semacam majelis rakyat di mana orang dapat berdebat dan membuat keputusan tentang ekonomi dan masyarakat tempat mereka tinggal (Clans, 2019). Partisipasi dan kontrol ini harus hadir dalam lingkup-lingkup kecil masyarakat seperti individu yang memiliki daya politik dan partisipasi langsung. Tujuan munisipalisme libertarian adalah membangkitkan kehidupan sipil yang telah hilang dengan begitu cepat dan mentransformasikannya ke ranah politik. Kondisi ini hendak melahirkan warga aktif keluar dari konstituen pasif dan memberi mereka memiliki pilihan-pilihan berarti. Demikian juga bertujuan menciptakan konteks ini dengan melembagakan kekuatannya dalam majelis lingkungan dalam rapat-rapat kota (Nalarpolitik.com, 2022).

Dengan memahami bahwa dasar persoalan dari relasi lingkungan dan masyarakat terdapat pada partisipasi politik masyarakat yang lemah, dimana masyarakat hanya di suguhi dengan ruang-ruang politik pasif yang pada prinsipnya sangat jauh dalam ruang politik besar penentu keputusan. Munisipalisme libertarian mengembangkan sejenis demokrasi langsung- didalamnya semua warga dalam komunitas-komunitas mengelola

urusan mereka sendiri melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pertemuan langsung (*face to face*), yang berbeda dengan yang dilakukan negara terhadap warganya (Biehl, 2017).

Dalam memahami persoalan lingkungan dan masyarakat, Munisipalisme Libertarian hadir dengan pandangan ekologi sosial bahwa problematika lingkungan saat ini dikarenakan tidak terdapatnya peranan politik masyarakat lokal dalam kebijakan dan pengelolaan. Maka dari itu bagaimana paradigma demokrasi langsung dalam munisipalisme libertarian sebagai dasar perjuangan gerakan agraria. Penelitian ini bertujuan untuk memahami paradigma berpikir Munisipalisme Libertarian dalam memahami persoalan lingkungan dan masyarakat dengan demokrasi langsung yang ditawarkannya.

STUDI LITERATUR

Demokrasi Langsung Libertarian Munisipalisme adalah ideologi politik yang berusaha menghidupkan kembali demokrasi langsung dan mengubah pemerintahan lokal yang ada menjadi demokrasi langsung (Biehl, 2017). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan masyarakat secara mandiri dan demokrasi langsung, di mana warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Aspek-aspek utama dari Demokrasi Langsung Libertarian Munisipalisme meliputi:

1. Demokrasi Langsung: Pendekatan ini menganjurkan warga negara untuk mengelola urusan mereka sendiri daripada bergantung pada intervensi negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan warga negara yang lebih aktif dan terlibat, melampaui peran pasif konstituen dalam sistem perwakilan konvensional.
2. Lokalisme: Munisipalisme libertarian menekankan pentingnya pemerintahan lokal dan manajemen mandiri masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan menumbuhkan rasa saling memiliki dan saling ketergantungan.
3. Rukun Tetangga (*Neighborhood Assemblies*): Perwujudan institusional inti dari munisipalisme libertarian adalah seruan untuk membangun majelis warga langsung, yang diorganisir di sekitar lingkungan, desa, dan kota. Majelis-majelis ini dipandang sebagai tempat untuk mengembangkan debat demokratis dan pengambilan keputusan kolektif (Hammy & Miley, 2022).
4. Ekologi Sosial: Munisipalisme libertarian terkait erat dengan Gerakan Ekologi Sosial, yang mengadvokasi pendekatan yang lebih holistik terhadap isu-isu sosial dan ekologi. Gerakan ini berusaha menciptakan masyarakat yang menyeimbangkan kebutuhan manusia, alam, dan generasi mendatang.
5. Otonomi Ekonomi: Pendekatan ini juga menekankan pentingnya otonomi ekonomi dan pengembangan ekonomi "kotamadya" atau "komunal". Hal ini dapat melibatkan alternatif-alternatif pekerja yang didasarkan pada demokratisasi hubungan sosial dan model-model koperasi (Hammy & Miley, 2022).

Gerakan agraria, yang secara historis sejalan dengan populisme dan demokrasi langsung, telah memperjuangkan keprihatinan para petani dan buruh tani. Partai Populis, yang aktif pada akhir tahun 1800-an, menganjurkan kebijakan yang mencakup inflasi, pajak penghasilan progresif, referendum, dan pemilihan langsung senator AS. Kebijakan tersebut selaras dengan kepentingan kelompok agraris di bidang politik. Populisme agraria umumnya dikaitkan dengan ideologi dan gerakan sosialis yang dipimpin oleh petani dan sekutunya, seperti serikat buruh, di berbagai negara (Khanacademy.org, 2018). Meskipun gerakan agraria umumnya tidak dikaitkan dengan gagasan radikal mengenai demokrasi langsung, terdapat perdebatan ilmiah mengenai penerapan radikal demokrasi langsung dalam masyarakat besar. Hal ini mungkin memerlukan perampasan properti produktif dan penggunaan metode langsung seperti protes massal dan perlawanan keras

terhadap intervensi polisi (Populismstudies.org, 2018). Namun diskusi-diskusi tersebut tidak terkait langsung dengan sejarah gerakan agraria. Ringkasnya, meskipun gerakan pertanian sering dikaitkan dengan usulan kebijakan tertentu dan dikaitkan dengan sudut pandang sosialis, literature sebelumnya tidak secara jelas menunjukkan korelasi langsung antara gerakan agraria dan konsep radikal demokrasi langsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Studi Literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Wasriah, 2009). Teknik pengumpulan data melibatkan pemahaman dan mempelajari teori-teori dari berbagai sumber literatur (buku, artikel, jurnal, arsip) yang relevan terhadap masalah yang akan diteliti dalam penelitian demokrasi langsung munisipalisme libertarian sebagai substansi gerakan agraria. Dalam Teknik Analisa Data yang digunakan, penelitian ini menggunakan strategi analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, yang diperjuangkan oleh munisipalisme libertarian adalah gerakan politik yang mampu menciptakan ruang publik vital yang demokratis untuk masyarakat, yang pada saat ini telah terkooptasi oleh otoritas negara dan kapitalisme. Negara melalui pemerintahannya memiliki kemampuan untuk melakukan sentralisasi kebijakan dan kapitalisme dengan prinsip konsumtif yang diciptakannya sehingga mampu menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi manusia yang pasif. Demokrasi langsung yang ditawarkan oleh munisipalisme libertarian merupakan konsep bagaimana terputusnya sentralisasi demokrasi tersebut (kebijakan dan pemerintahan) yang notabene menjadi instrumen negara tanpa melibatkan masyarakat. Munisipalisme libertarian merupakan politik ekologi sosial, sebuah upaya revolusioner di mana kebebasan diberikan dalam bentuk institusional dalam majelis publik yang menjadi badan pengambil keputusan (Bookchin, 2015).

Memahami persoalan agraria saat ini tidak akan terlepas dengan persoalan ekologis, bahwa sumber persoalannya dikarenakan absennya keterlibatan masyarakat dalam menentukan apa yang akan terjadi terhadapnya dan pola-pola konsumtif ekstrem yang dibentuk agar masyarakat tidak dapat lepas dari kehidupan konsumsinya, menjadikan masyarakat sebagai objek dalam kehidupannya. Bahwa objektifikasi terhadap masyarakat dan lingkungan yang terjadi tersebut diaktori oleh siasat kepentingan besar dari negara dan kapitalisme. Negara membuat kebijakan, sementara perusahaanlah yang menjalankannya. Namun, akumulasi uang, hubungan antara ekspansi ekonomi, produksi, dan konsumsi, merupakan dasar dari masalah degradasi lingkungan yang sangat besar. Eksploitasi dibenarkan sebagai upaya untuk mencapai kemakmuran dengan kedok pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempertahankan tingkat pendapatan negara, dan menumbuhkan iklim bisnis dan tenaga kerja. Hal ini menjadi dasar dari sikap negosiasi pasar yang semakin kuat, terutama dalam konteks keharusan pemerintah (Transisi.org, 2020). Praktik panjang akumulasi kekayaan oleh kapitalisme akan selalu memanfaatkan potensi lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga eksploitasi lingkungan yang terjadi adalah tindakan utama dalam menstimulus akumulasi kekayaan kapitalisme.

Kritik besar munisipalisme libertarian bukan hanya tertuju kepada kapitalisme saja, namun juga negara sebagai instrumen penindas, apa yang dimaksud sebagai desentralisasi demokrasi oleh munisipalisme libertarian dibentuk dengan komunitas melalui majelis-majelis warganya, prinsipnya adalah kemampuan mandiri untuk pengelolaan dan

keputusan, nantinya hal ini akan menggeser peranan partai yang cenderung termasuk sebagai instrumen penindas negara terhadap warganya, apalagi relasi antara partai dan warga dalam keterwakilannya merupakan hal yang sangat bias dalam mengakomodir kebutuhan warganya. Partai politik, yang terkadang dikaitkan dengan "politisi", bukanlah kumpulan warga negara yang berpikiran terbuka dan memiliki keyakinan politik yang sama. Partai-partai politik pada dasarnya adalah birokrasi hirarkis dari atas ke bawah yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan negara melalui para kandidat. Kepentingan utama mereka adalah kepentingan faksi, kekuasaan, dan mobilisasi, bukan kepentingan kesejahteraan sosial "konstituen" para pemegang jabatan - kecuali jika tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan tujuan para penambang suara. Oleh karena itu, sangat menggelikan untuk menyatakan bahwa bentuk partai politik seperti ini muncul dari atau dipengaruhi oleh politik kelembagaan. Fungsi partai, alih-alih mengekspresikan kehendak pemilih, adalah membangun politik kelembagaan, mengelola dan memanipulasinya, dan mencegahnya memiliki kehendak yang otonom (Biehl, 2017). Hal ini (Munisipalisme) bertujuan untuk mendapatkan kembali ruang publik untuk menjalankan kewarganegaraan otentik sambil melepaskan diri dari siklus suram parlementerisme dan mistifikasi mekanisme "partai" sebagai sarana representasi publik (Bookchin, 2015).

Dalam membangun gerakan untuk menggantikan peranan demokrasi representatif partai, munisipalisme menawarkan langkah-langkah pencapaian yang harus diambil: *Pertama*, bertemu satu sama lain dan mengenali kesamaan pandangan dari gagasan-gagasan munisipalisme libertarian dan ekologi sosial, untuk mendapatkan landasan teoritis. *Kedua*, kelompok tersebut sebaiknya berlanjut dengan mendidik orang atau kelompok lain, meluaskan kelompok studi dan keterlibatan banyak orang, *Ketiga*, menggelar pendidikan publik, dimulai dengan masalah politik dan ekologis lokal yang menjadi perhatian masyarakat umumnya, dengan seruan demokrasi lokal. *Keempat*, mengorganisasikan aksi-aksi yang berhubungan dengan isu-isu terdekat dan mempertautkannya dengan tuntutan warga akan majelis guna membuka ruang bagi warga untuk mengambil keputusan. *Kelima*, mengundang anggota baru dan menata diri dengan seperangkat aturan bagi administrasinya sendiri. Melalui komunitas dengan majelis warga ini, demokrasi langsung dapat dihadirkan, sehingga capaian terhadap tujuan besar dari persoalan masyarakat dan lingkungan semakin dekat, karena proses desentralisasi demokrasi dengan melibatkan partisipasi politik yang besar terhadap masyarakat.

Jika majelis warga dalam penjelasan sebelumnya hadir sebagai upaya perlawanan terhadap negara dengan desentralisasi demokrasi sehingga mampu menghadirkan demokrasi langsung, dalam perlawanan terhadap kapitalismenya, munisipalisme libertarian harus mampu dalam melahirkan upaya swakelola dalam melepas ketergantungannya terhadap pola konsumsi ekstrem kapitalisme dan sebagai upaya membantah manipulasi *Green Industry* yang digaungkan kapitalisme, yang justru merekalah (kapitalisme) aktor yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan global yang terjadi. Alih-alih peradaban pusat perbelanjaan, kita harus membangun masyarakat yang terdesentralisasi di mana "rumah" kita, wilayah kita, sebisa mungkin bersifat otonom. Kita perlu membangun pabrik-pabrik lokal dengan alat-alat sederhana. Koperasi-koperasi lokal, seperti koperasi makanan, harus didirikan. Kita harus mencoba menanam sebanyak mungkin bahan pangan sendiri. Kita harus sedapat mungkin menyingkirkan uang dan menggunakan barter atau metode pembayaran alternatif. Komunitas lokal yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kemungkinan besar akan berkembang di luar arus utama masyarakat. Pemukiman ini secara bertahap akan berkembang menjadi masyarakat yang ramah lingkungan dan humanis (Bookchin, 2015). Jika kapitalisme tidak menghancurkan biosfer, mungkin dalam waktu tiga puluh, bahkan lima puluh tahun, dunia yang masih bertahan akan mengalami perubahan yang melampaui imajinasi kita. Dunia petani tidak hanya akan musnah, namun sebagian besar

“alam” yang sering kita sebut “liar” juga akan musnah (Socialecology.org, 1998).

Gagasan Radikal Demokrasi Langsung Terhadap Gerakan Agraria

Demokrasi langsung munisipalisme libertarian memiliki konsep-konsep yang menjadi dasar gerakan agraria. Gagasan-gagasan ini menekankan pada desentralisasi, demokrasi berbasis pertemuan dan kekuatan komunitas lokal untuk membentuk masa depan mereka sendiri, yang dijadikan sebagai dasar dalam memahami persoalan agraria. Aspek-aspek kunci dari konsep-konsep ini meliputi:

1. Demokrasi yang terdesentralisasi dan berbasis pada pertemuan: Demokrasi Langsung Radikal dan Libertarian Munisipalisme menganjurkan sistem desentralisasi di mana kekuasaan dipegang oleh majelis lokal, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (Roarmag.org, 2017). Pendekatan ini menekankan pentingnya tata kelola lokal dan otonomi masyarakat.
2. Keadilan dan keberlanjutan ekonomi: Gerakan ini berfokus pada penciptaan kota yang adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis yang memprioritaskan kesejahteraan semua penduduk (Dissentmagazine.org, 2020). Contohnya adalah Barcelona en Comú, yang telah menerapkan kebijakan untuk mengendalikan Airbnb, mengotaki departemen listrik, dan mempersulit bank untuk menyita (Greeneuropaeajournal.eu, 2018).
3. Demokrasi langsung: Munisipalisme libertarian, seperti yang dikembangkan oleh Murray Bookchin, menyerukan sistem demokrasi langsung di mana warga negara memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi komunitas lokal mereka (Dissentmagazine.org, 2020). Pendekatan ini mengikis kedaulatan rakyat negara dan memberdayakan warga negara untuk menentukan nasib mereka sendiri.
4. Pendekatan pembangunan gerakan: Gerakan-gerakan munisipal sering kali mengadopsi pendekatan pembangunan gerakan, dengan fokus pada pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat untuk menuntut perubahan (Dissentmagazine.org, 2020).
5. Agenda yang saling terkait: Gerakan-gerakan munisipalisme sering kali mengejar berbagai tujuan secara bersamaan, termasuk memerangi rasisme, mendorong pembebasan feminis, mengadvokasi keadilan ekonomi, dan mempromosikan demokrasi langsung. Pendekatan ini mengakui keterkaitan berbagai tantangan dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk membangun transformasi yang berkepanjangan (Resilience.org, 2017).

Prinsip-prinsip ini mengadvokasi desentralisasi, demokrasi berbasis pertemuan, keadilan ekonomi, keberlanjutan, dan metode pembangunan gerakan untuk mencapai perubahan di tingkat lokal dan regional. Gerakan ini memiliki beberapa perspektif, seperti ekologi politik dan anarkisme sosial (Anarkis.org, 2016). Berikut adalah beberapa contoh gerakan agraria dalam munisipalisme libertarian: *Pertama*, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas, merupakan salah satu contoh gerakan masyarakat yang menitikberatkan pada kepedulian lingkungan dan transformasi sosial. *Kedua*, Sharing Power: Perspektif Egalitarian Pengelolaan Sumber Daya Alam : Anarkisme menawarkan banyak pilihan ide, taktik, dan strategi praksis yang tidak tunggal, termasuk dalam aspek pengelolaan sumber daya alam. *Ketiga*, Gerakan Ekologi Fourth World: Ini adalah gerakan yang mengarah pada akar-akar anarkisme liberal dan anarko-libertarian, menjadi salah satu dari berbagai macam *green movement* (Anarkis.org, 2016).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan Memahami permasalahan agraria saat ini sangatlah penting karena didorong oleh tidak adanya keterlibatan masyarakat dan pola konsumtif

yang ekstrim. Akumulasi kekayaan mendorong objektifikasi masyarakat dan lingkungan hidup, dimana negara berperan sebagai pengambil kebijakan dan korporasi sebagai penerimanya. Munisipalisme libertarian bertujuan untuk mendapatkan kembali ruang publik untuk menjalankan kewarganegaraan otentik sambil melepaskan diri dari siklus suram parlementerisme dan mistifikasi mekanisme “partai” sebagai sarana representasi publik. Untuk mencapai hal ini, gerakan agrarian harus bertemu satu sama lain, mendidik orang lain, menyelenggarakan pendidikan publik, menghubungkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan isu-isu mendesak dengan tuntutan warga untuk berkumpul, dan mengundang anggota baru dan mengatur dirinya sendiri dengan aturan-aturan untuk pemerintahannya sendiri. Untuk melawan kapitalisme, munisipalisme libertarian harus menghasilkan upaya manajemen mandiri, melepaskan ketergantungan pada pola konsumsi ekstrem, dan menolak manipulasi Industri Hijau (*Green Industry*) yang dipromosikan oleh kapitalisme. Dengan mengembangkan masyarakat yang terdesentralisasi, masyarakat lokal dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang humanis dan ramah lingkungan.

Memahami duduk persoalan persoalan lingkungan saat ini adalah dengan cara memahami krisis gerakan lingkungan termasuk gerakan agrariannya, memahami krisis gerakan lingkungan yang terjadi dengan memahami daya politik masyarakat yang pasif dan kecil dalam menentukan kehidupan sosial dengan relasinya terhadap lingkungan. Gerakan Agraria harus didasarkan pada demokrasi langsung munisipalisme libertarian, yang menekankan pada desentralisasi, demokrasi berbasis pertemuan, dan kekuatan komunitas lokal untuk membentuk masa depan mereka. Prinsip-prinsip ini mencakup desentralisasi demokrasi, keadilan dan keberlanjutan ekonomi, demokrasi langsung, pendekatan membangun gerakan, dan agenda-agenda yang saling terkait. Prinsip-prinsip ini mendorong warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan kota-desa yang adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis, dan memberdayakan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri sehingga tujuan besar keadilan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anarkis.org. (2016). Sharing Power: Perspektif Egalitarian Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bag.1). *Anarkis.org*. <https://anarkis.org/2016/05/24/sharing-power-perspektif-egalitarian-pengelolaan-sumber-daya-alam/>
- Biehl, J. (2017). *Politik Ekologi Sosial: Munisipalisme Libertarian*. Daun Malam.
- Bookchin, M. (2015). *The next revolution: Popular assemblies and the promise of direct democracy*. Verso Books.
- Clans, B. (2019). Wawancara Bookchin: Ekologi Sosial dan Munisipalisme Libertarian sebagai Solusi Berlingkungan serta Perdebatan Tantangannya. *Bodoamat.noblogs.org*. <https://bodoamat.noblogs.org/post/2019/07/28/wawancara-bookchin-ekologi-sosial-dan-munisipalisme-libertarian-sebagai-solusi-berlingkungan-serta-perdebatan-tantangannya/>
- Danial & Wasriah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Dissentmagazine.org. (2020). The Municipalist Moment. *Dissentmagazine.org*. <https://www.dissentmagazine.org/article/the-municipalist-moment/>
- Foster, J. B. (2013). *Ekologi Marx: Materialisme dan Alam*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Aliansi Pemuda Progresif.
- Greeneuropeanjournal.eu. (2018). Libertarian Municipalism & Murray Bookchin's Legacy. *Greeneuropeanjournal.eu*. <https://www.greeneuropeanjournal.eu/municipalism-murray-bookchins-legacy/>

- Hammy, C., & Miley, T. J. (2022). Lessons From Rojava for the Paradigm of Social Ecology. *Frontiers in Political Science*, 3, 147.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan Pemberdayaan di Sektor Publik*. Malang: Literasi Nusantara.
- Khanacademy.org. (2018). In The Late Nineteenth Century, a New American Political Party Sprung Up to Defend The Interests of Farmers. *Khanacademy.org*. <https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/the-gilded-age/gilded-age/a/the-populists>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Nalarpolitik.com. (2022). Munisipalisme Libertarian, Alternatif untuk Politik dan Demokrasi Kita. *Nalarpolitik.com*. <https://nalarpolitik.com/munisipalisme-libertarian-alternatif-untuk-politik-dan-demokrasi-kita>
- Populismstudies.org. (2018). Agrarian Populism. *Populismstudies.org*. <https://www.populismstudies.org/Vocabulary/agrarian-populism/>
- Roarmag.org. (2017). Radical Municipalism: The Future We Deserve. *Roarmag.org*. <https://roarmag.org/magazine/debbie-bookchin-municipalism-rebel-cities/>
- Resilience.org. (2017). The New Municipal Movements. *Resilience.org*. <https://www.resilience.org/stories/2017-08-04/new-municipal-movements/>
- Socialecology.org. (1998). Thoughts on Libertarian Municipalism. *Socialecology.org*. <https://social-ecology.org/wp/1999/08/thoughts-on-libertarian-municipalism/>
- Transisi.org. (2022). Memajukan Diskursus dan Gerakan Lingkungan Hidup. *Transisi.org*. <https://transisi.org/memajukan-diskurus-dan-gerakan-lingkungan-hidup/>